

Pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy* terhadap *Financial Sustainability*: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Indonesia

Dito Mulda Saferi¹, Vita Fitria Sari²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: ditomuldasaferi@gmail.com

Tanggal Masuk:

27 Maret 2024

Tanggal Revisi:

10 Juli 2024

Tanggal Diterima:

24 Juli 2024

Keywords: *Budget Transparency; Fiscal Autonomy; Financial Sustainability*

How to cite (APA 6th style)

Saferi, D.M., & Sari, V.F. (2024). Pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy* terhadap *Financial Sustainability*: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (3), 1182-1196.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1600>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of budget transparency and fiscal autonomy on the financial sustainability of local governments in Indonesia. The data in this study were sourced from the Local Government Financial Statements obtained from the official website of the local government and the BPK RI website and TPAD data viewed on the official website of the local government. The sample collection method uses a purposive sampling method calculated using the Slovin formula. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression analysis. The results showed that budget transparency has no significant effect on financial sustainability and fiscal autonomy has a significant effect on financial sustainability.

PENDAHULUAN

Krisis keuangan dunia tahun 2008 dan pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi serta memperhatikan keseimbangan anggaran (Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2022). Penurunan keuangan publik akibat krisis tersebut dapat menyebabkan kondisi krisis keuangan di berbagai tingkat pemerintahan (Pina et al., 2020). Kondisi krisis keuangan tersebut dapat melemahkan kapasitas pemerintah agar dapat terus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang didasarkan pada keberlanjutan keuangan layanan publik. Oleh karena itu, analisis keberlanjutan keuangan di setiap tingkat pemerintahan diperlukan untuk membuat kebijakan yang tepat untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk kesejahteraan generasi yang akan datang (Subires et al., 2019).

Sejak otonomi daerah berlaku, pengelolaan daerah telah dialihkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang memegang kendali sebelumnya. Dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengurus sendiri pemerintahannya dengan kewenangan yang sama sebagai daerah otonom. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut harus dicapai dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah agar dapat memberikan layanan publik yang berkelanjutan kepada masyarakat. Keuangan daerah dengan kondisi yang baik bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mencapai keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*). *Financial Sustainability* merupakan kemampuan pemenuhan kewajiban pemberian layanan publik baik secara kualitas maupun kuantitas kepada masyarakat untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk sekarang dan masa depan (Rodríguez Bolívar, 2017).

Menurut IFAC (2012) pemerintah daerah yang dapat mempertahankan atau meningkatkan volume dan pelayanan publik merupakan pemerintah daerah yang memiliki kemampuan *financial sustainability*. Pemerintah daerah perlu mengetahui faktor penting yang memengaruhi *financial sustainability* agar dapat membuat kebijakan yang tepat dalam memberikan pelayanan publik secara berkelanjutan. Menurut Gardini & Grossi (2018) *Financial sustainability* merupakan kondisi kebalikan dari kesulitan keuangan atau *financial distress* yaitu kondisi pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan memberikan pelayanan publik. Faktor penentu pada *financial sustainability* sangat berkaitan dengan faktor apa saja yang memengaruhi *financial distress*. Oleh karena itu, faktor penentu pada *financial distress* juga dapat menjadi solusi untuk *financial sustainability* (Rodríguez Bolívar, 2017). Faktor yang dapat memengaruhi *financial sustainability* yaitu berasal dari eksternal dan internal Wällstedt et al (2014). Faktor eksternal terkait dengan aspek sosial, demografi, dan ekonomi sedangkan faktor internal terkait dengan faktor manajerial dan politik (Gardini & Grossi, 2018).

Penelitian ini berfokus pada faktor internal yang memengaruhi *financial sustainability*. Faktor yang bersifat internal seperti faktor manajerial daerah lebih mudah diatur atau dikendalikan dibandingkan faktor eksternal (Wällstedt et al., 2014). Faktor internal dari sisi manajerial terkait langsung dengan aspek pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang kurang baik mengakibatkan kondisi keuangan pemerintah daerah tidak mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal dan berkelanjutan kepada masyarakat. Selain itu, Penelitian *financial sustainability* yang didasarkan pada faktor eksternal lebih banyak dibandingkan penelitian yang didasarkan pada faktor internal, hanya sedikit penelitian empiris yang fokus pada kondisi internal yang bersifat manajerial (Gardini & Grossi, 2018). Oleh karena itu, penelitian dari faktor internal seperti manajerial penting dilakukan agar dapat mengetahui apakah praktik pengelolaan keuangan yang pemerintah daerah lakukan berpengaruh terhadap kemampuan pemberian layanan berkelanjutan. Oleh karena itu, *budget transparency* dan *fiscal autonomy* merupakan faktor internal dalam pemerintahan dari sisi faktor manajerial yang harus menjadi perhatian besar oleh pemerintah daerah, sehingga penulis tertarik untuk menjadikan *budget transparency* dan *fiscal autonomy* sebagai variabel penentu terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah.

Budget transparency merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan agar tercapainya *financial sustainability*. Untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, sangat penting untuk mengawasi kondisi keuangan daerah dengan mengawasi sumber dana dan pembiayaan yang digunakan (Bisogno et al., 2019). Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui upaya transparansi anggaran (*budget transparency*). Menurut (Alcaraz-

Quiles et al., 2014) keterbukaan anggaran kepada publik sangat erat kaitannya dengan upaya pengelolaan pembangunan yang keberlanjutan. Pemerintah daerah dapat menunjukkan keterbukaan informasi bahwa sumber daya yang digunakan telah digunakan secara maksimal dan sesuai kepentingan masyarakat melalui *budget transparency* (Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2022). Dengan Transparansi informasi publik dapat meningkatkan upaya pemerintah untuk merumuskan peraturan yang dapat memperkuat kondisi keuangan yang berkelanjutan (Arbatli & Escolano, 2015). Menurut Bastida & Benito (2009) semakin tinggi tingkat *budget transparency* akan mengurangi kondisi yang memungkinkan pejabat daerah menggunakan defisit fiskal untuk tujuan kepentingan pribadi sehingga akan memperkuat kualitas pengelolaan keuangan. Dengan peningkatan pengelolaan keuangan tersebut akan memperkuat kondisi keuangan sehingga pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk memberikan pelayanan publik secara berkelanjutan (Andrews, 2015).

Faktor penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk mencapai *financial sustainability* dalam praktik desentralisasi yaitu *fiscal autonomy*. *Fiscal autonomy* yang merupakan kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemenuhan kewajiban pelayanan publik dengan biaya sendiri (Koromath, 2016). Kondisi keuangan daerah akan stabil jika pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya dan mencari pendanaan sendiri. Kondisi tersebut ditunjang dengan hak yang dimiliki pemerintah daerah untuk memaksimalkan segala sumber pendanaan potensial yang dapat menjadikan daerah otonom mandiri dan berkelanjutan. Hasil Penelitian yang dilakukan Santis (2020) menyatakan bahwa *fiscal autonomy* memiliki pengaruh negatif pada *financial sustainability*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lhutfi & Sugiharti (2022) menyatakan hubungan positif antara kemandirian keuangan daerah dan *financial sustainability*. Dengan adanya penemuan baru yang menunjukkan hasil yang berbeda tersebut, perlu dilakukan kembali penelitian lebih lanjut tentang pengaruh *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability*.

Pada sektor publik masih relatif sedikit yang meneliti topik *financial sustainability* dalam konteks Indonesia ataupun internasional. Penelitian yang menguji kondisi atau kesehatan keuangan telah sering dilakukan, tetapi yang berfokus pada *financial sustainability* masih sangat terbatas (Rodríguez Bolívar, 2017). Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti *financial sustainability* pada pemerintah daerah di Indonesia .

Menurut Barbera et al (2017) pengelolaan keuangan setiap daerah berbeda-beda karena aturan administrasi dari pemerintah pusat, sifat atau karakteristik daerah, dan besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah. Indonesia adalah negara yang terbentuk dari banyak pulau yang tentunya memiliki karakteristik tertentu pada masing-masing daerah. Untuk itu, penting untuk melakukan penelitian *financial sustainability* dengan populasi seluruh kabupaten dan kota di yang tersebar di seluruh pulau infonesia dengan karakteristik daerah dan tingkat pengelolaan pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2022) yang menguji pengaruh *budget transparency* terhadap *financial sustainability*. Pertama, Penelitian ini menambahkan variabel *fiscal autonomy* untuk menguji pengaruhnya terhadap *financial sustainability*. Kedua, *Financial sustainability* pada penelitian ini diukur dengan indikator Rodríguez Bolívar et al (2016) yaitu laporan operasional yang disesuaikan tanpa memperhitungkan pos luar biasa. Ketiga, Variabel *budget transparency* pada penelitian ini diukur dengan 12 indikator Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015. Keempat, populasi dan periode pengamatan penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Indonesia dengan periode waktu penelitian tahun 2020-2022.

Dari penjelasan yang telah dibahas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy* terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah pada Kabupatendan Kota di Indonesia.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori keagenan (*Agency theory*)

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan kaitan yang terjalin antara *principal* dan *agent*. Teori ini menjelaskan hubungan kontrak antara *Principal* yang merupakan pihak yang mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada *agent* yang merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh *principal*. Kontrak yang dibuat bertujuan untuk menegaskan bahwa *agent* harus bertindak keinginan *principal*. Namun, hubungan tersebut tidak terlepas dari tidak seimbangannya informasi karena *agent* memiliki lebih banyak informasi atas semua kegiatan daripada *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan juga dapat diimplikasikan pada organisasi sektor publik. Hubungan tersebut digambarkan antara pemerintah daerah yang bertindak sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* serta hubungan pemerintah daerah selaku *agent* dan pemerintah daerah selaku *principal*. Menurut Nurhadianto & Khamisah (2019) perjanjian yang terjalin pada kedua belah pihak berpusat bagi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam penerapannya tindakan yang dilakukan pemerintah terkadang menyimpang dari fungsinya dengan memberikan informasi yang terbatas kepada masyarakat. Terbatasnya informasi yang didapatkan masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan karena kepemilikan informasi yang tidak setara antara pemerintah dan masyarakat.

Financial Sustainability

Financial Sustainability merupakan kemampuan pemenuhan kewajiban pemberian layanan publik baik secara kualitas maupun kuantitas kepada masyarakat untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk saat ini dan masa depan (Rodríguez Bolívar, 2017). *Financial Sustainability* diukur menggunakan laporan operasional disesuaikan dengan menghilangkan pos-pos luar biasa. Surplus pada laporan operasional dapat mengindikasikan stabilitas keuangan pada pemerintah daerah. Karena pendekatan berbasis akrual pada laporan operasional memperhitungkan pengeluaran yang ada secara aktual, proyeksi pengeluaran atau biaya pada masa depan, dan pemanfaatan investasi modal, pendekatan ini secara efektif menunjukkan kemampuan suatu daerah agar terus memenuhi kewajiban pemberian layanan publik di masa yang akan datang (Rodríguez Bolívar et al., 2016).

Budget Transparency

Menurut OECD anggaran adalah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana penggunaan sumber daya publik dalam rangka mencapai tujuan (Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2023). Menurut Kopits dan Craig, premchand dalam Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2023) secara lebih luas, *budget transparency* didefinisikan sebagai publikasi informasi terkait anggaran kepada masyarakat terkait prosedur dan transaksi pengambilan keputusan yang menekankan bahwa informasi yang disediakan dapat diandalkan, dapat dimengerti, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai secara akurat terkait posisi keuangan pemerintah serta biaya dan manfaat yang sebenarnya atas kegiatan yang dilakukan pemerintah saat ini dan dan imlikasinya pada masa depan.

Pada penelitian ini *budget transparency* menggunakan indikator yang mengacu pada dokumen transparansi anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi diterbitkan sebagai upaya memperkuat transparansi anggaran

pemerintah daerah. Inpres tersebut mengharuskan pemerintah daerah mempublikasikan 12 dokumen transparansi anggaran pada website pemerintah daerah (Syamsul, 2020).

Fiscal Autonomy

Fiscal autonomy merupakan kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemenuhan kewajiban pelayanan publik dengan biaya sendiri (Koromath, 2016). *Fiscal autonomy* menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara maksimal dengan prinsip efektif dan efisien dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. *Fiscal autonomy* daerah dapat diukur dengan membagi jumlah pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan operasional (ritonga, 2014).

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh *budget transparency* terhadap *financial sustainability*

Agency theory berasumsi bahwa pengelola pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan sendiri sehingga tidak memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan menuntut untuk mengetahui lebih banyak informasi untuk mengawasi seberapa baik kinerja dari pemerintah daerah dan seberapa baik kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di masa depan. Menurut Barrett (2002) *budget transparency* menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah bertanggung jawab sepenuhnya berdasarkan kepentingan masyarakat. Pemerintah akan mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan publik berkelanjutan melalui maksimalisasi pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat (Subroto, 2014).

Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2022) menyatakan bahwa *budget transparency* berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*. *Budget transparency* bisa menjadi strategi untuk menginformasikan sumber daya yang digunakan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah agar menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga akan mendorong tercapainya pemberian layanan publik secara berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat *budget transparency* akan mengurangi kemungkinan pejabat daerah menargetkan defisit fiskal untuk kepentingan pribadi (Bastida & Benito, 2009). Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Budget transparency* berpengaruh positif terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah.

Pengaruh *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability*

Berdasarkan *agency theory*, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, antara pemerintah daerah dan pusat memiliki kepentingannya sendiri. Namun, tujuan utamanya tetaplah sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik. Pemerintah daerah yang berlaku sebagai agen telah diberikan kewenangan untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerah sehingga dapat mendorong tercapainya *fiscal autonomy* dengan membiayai pemerintahan dari dana sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Kondisi keuangan daerah yang stabil ditunjukkan oleh kemandirian pemerintah dengan mencari pendanaan sendiri dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk membiayai pelayanan publik secara mandiri. Kondisi tersebut dapat menjadikan suatu daerah otonom yang mandiri dan berkelanjutan (Maizunati et al., 2020).

Hasil penelitian Navarro-Galera et al (2016) mengindikasikan pengaruh positif pendapatan asli daerah pada *financial sustainability*. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lhutfi & Sugiharti (2022) menyatakan kemandirian keuangan dapat meningkatkan kemampuan *financial sustainability*. Artinya, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka semakin menjamin keberlanjutan keuangan suatu daerah. Pemerintah daerah yang mampu membiayai pelayanan publik dengan biaya sendiri akan lebih baik dalam mencapai *financial sustainability* karena tidak terlalu bergantung kepada dana dari pemerintah pusat (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: *Fiscal autonomy* berpengaruh positif terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian asosiatif kausal menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh *budget transparency* dan *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah. Data yang digunakan bersumber dari website resmi pemerintah daerah dan melalui website e-ppid.bpk.go.id.

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia. Pemilihan sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* yang memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu memiliki LKPD yang telah diaudit tahun 2020-2022 dan pemerintah daerah yang website resminya bisa diakses. Pemilihan sampel dihitung dengan rumus slovin. Rumus slovin dipakai untuk mendapatkan berapa jumlah sampel yang mewakili semua populasi atau lebih akurat dan mendekati populasi (sugiyono 2017). Perhitungan sampel yaitu:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N (\epsilon)^2} \\
 &= \frac{516}{1 + 516 (0,01)^2} \\
 &= \frac{516}{6,16} \\
 &= 83,7
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut maka jumlah sampel yang mewakili populasi yaitu 83, 7 kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel. Pembulatan menjadi 100 sampel karena menurut hair et al (2018) ukuran sampel yang baik berjumlah 100 sampel atau lebih besar. Penelitian ini menggunakan 3 tahun periode pengamatan dari tahun 2020-2022, sehingga total sampel pada penelitian ini berjumlah 300 sampel.

Variabel dan Pengukuran

Financial Sustainability

Financial sustainability adalah kemampuan pemenuhan kewajiban pemberian layanan publik baik secara kualitas maupun kuantitas kepada masyarakat untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masa depan. *Financial sustainability* pada diukur menggunakan indikator Rodríguez Bolívar et al (2016) yaitu laporan operasional yang disesuaikan tanpa memperhitungkan komponen luar biasa. Surplus/defisit pada laporan operasional dijumlahkan dengan komponen negatif (beban luar biasa) kemudian dikurangi dengan komponen positif (pendapatan luar biasa).

Budget transparency

Budget transparency didefinisikan sebagai publikasi informasi terkait anggaran kepada masyarakat terkait prosedur dan transaksi pengambilan keputusan yang menekankan bahwa informasi yang disediakan dapat diandalkan, dapat dimengerti, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. Pada penelitian ini, *budget transparency* diukur menggunakan 12 indikator TPAD yang mengacu pada Inpres RI No. 7 Tahun mengacu pada kriteria Ritonga & Syahrir (2016) yang dilengkapi oleh Nulailah & Syamsul (2021). Kriterianya yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan kelengkapan.

Indeks TPAD dihitung dengan menggunakan skor dikotomi, apabila suatu indikator TPAD pada website resmi pemerintah daerah tersedia, dapat diakses, tepat waktu, lengkap akan diberi skor 1 pada setiap kriteria dan 0 pada setiap kriteria jika kondisi sebaliknya. Lalu Skor pada setiap kriteria dikalikan 0,25 untuk setiap indikator. Kemudian dilakukan penjumlahan untuk memperoleh skor total untuk setiap indikator. Lalu , indeks TPAD dihitung dengan jumlah skor didapatkan dengan jumlah perolehan skor maksimal lalu dikalikan 100 (Nulailah & Syamsul, 2021).

Fiscal Autonomy

Fiscal autonomy yang ditunjukkan dengan kemandirian keuangan daerah yaitu kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, menggerakkan pembangunan, dan menyediakan layanan publik kepada masyarakat dengan dana sendiri. Pada penelitian ini pengukuran *fiscal autonomy* merujuk pada indikator dari (ritonga, 2014). *Fiscal autonomy* diukur dengan perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan operasional kemudian dikalikan 100.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Budget Transparency	300	.00	95.83	30.7777	30.60777
Fiscal Autonomy	300	1.74	80.29	17.2054	11.67115
Financial Sustainability	300	-4.55E+11	3.39E+12	1.6012E+11	3.83332E+11
Valid N (listwise)	300				

Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 300 sampel. Pada variabel *financial sustainability* memiliki nilai maksimum sebesar 3.393.384.946.095,50, nilai minimum sebesar -454.869.092.262,52, nilai rata-rata (mean) sebesar 160.117.099.046.03 serta nilai standar deviasi sebesar 383.332.113.907,52 maksimal nilai variabel *budget transparency* yaitu 95.83 minimal nilai *budget transparency* yaitu 0,00, rata-rata (mean) senilai 30,77 dan standar deviasi senilai 30,60. Pada variabel *fiscal autonomy* maksimal nilai yaitu 80.29, minimal nilai yaitu 1.74, rata-rata (mean) senilai 17.20 dan standar deviasi senilai 11.67.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.09500816
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.061
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan transformasi variabel independen dan dependen dalam bentuk logaritma natural hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,20 > 0,05$ sehingga data pada model penelitian berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	22.864	.527		43.352	.000		
	LN Budget Transparency	-.008	.106	-.006	-.079	.937	.955	1.047
	LN Fiscal Autonomy	.998	.164	.458	6.096	.000	.955	1.047

- a. Dependent Variable: LN Financial Sustainability

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 yaitu sebesar 1,047 sehingga data pada model penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.808	.096		8.381	.000
	LN Budget Transparency	-.002	.002	-.095	-1.422	.157
	LN Fiscal Autonomy	.004	.004	.070	1.051	.295

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dilihat dari tabel 4, uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,157 > 0,05$ pada variabel *budget transparency* dan $0,295 > 0,05$ pada variabel *fiscal autonomy* sehingga data terbebas masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.457 ^a	.208	.198	1.10243	2.170	

a. Predictors: (Constant), LN Fiscal Autonomy, LN Budget Transparency

b. Dependent Variable: LN Financial Sustainability

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa $dl < du < dw < 4-du < 4-dl$ yaitu $(1,692 < 1,774 < 2,170 < 2,226 < 2,308)$ sehingga pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien determinasi (R²)

Tabel 6
Uji Koefisien determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.457 ^a	.208	.198	1.10243	

a. Predictors: (Constant), LN Fiscal Autonomy, LN Budget Transparency

b. Dependent Variable: LN Financial Sustainability

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,198. Hasil uji koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa pada model penelitian ini variabel dependen *financial sustainability* dapat dijelaskan oleh variabel independen *budget transparency* dan *fiscal autonomy* sebesar 19,8% sedangkan sisanya sebesar 80,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 7
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47.045	2	23.523	19.355	.000 ^b
	Residual	178.657	147	1.215		
	Total	225.703	149			

a. Dependent Variable: LN Financial Sustainability

b. Predictors: (Constant), LN Fiscal Autonomy, LN Budget Transparency

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji signifikansi simultan menunjukkan bahwa nilai probability signifikansi pada penelitian ini bernilai $0,000 < 0,05$ yang dapat ditarik kesimpulan secara simultan variabel *budget transparency* dan *fiscal autonomy* berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	22.864	.527		43.352	.000
	LN Budget Transparency	-.008	.106	-.006	-.079	.937
	LN Fiscal Autonomy	.998	.164	.458	6.096	.000

a. Dependent Variable: LN Financial Sustainability

Dilihat dari tabel 8, uji parsial menunjukkan hasil probability signifikansi variabel *budget transparency* senilai $0,937 > 0,05$ yang dapat disimpulkan variabel *budget transparency* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*. Variabel *fiscal autonomy* memiliki nilai probability signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga ditarik kesimpulan variabel *fiscal autonomy* berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9
Analisis Regresi Linear Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.864	.527		43.352	.000
	LN Budget Transparency	-.008	.106	-.006	-.079	.937
	LN Fiscal Autonomy	.998	.164	.458	6.096	.000

a. Dependent Variable: LN Financial Sustainability

Berdasarkan hasil tersebut, persamaan regresi dijelaskan dengan model berikut :
 $LNFS = 222.864 - 0.008 LNBT + 0.998 LNFA + \epsilon$

Nilai konstanta menunjukkan nilai konstanta sebesar 22.864, artinya bahwa jika variabel independen yaitu *budget transparency* dan *fiscal autonomy* bernilai 0, nilai *financial sustainability* yaitu 22.864. Nilai koefisien dari variabel *budget transparency* menunjukkan angka -0.008, artinya bahwa setiap kenaikan variabel *budget transparency* satu satuan, maka variabel *financial sustainability* akan menurun sebesar 0.008. Nilai koefisien dari variabel *fiscal autonomy* menunjukkan angka 0,998, yang mengartikan bahwa setiap kenaikan variabel *fiscal autonomy* sebesar satu satuan maka variabel *financial sustainability* akan meningkat sebesar 0,998.

PEMBAHASAN

Pengaruh *budget transparency* terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan hasil variabel *budget transparency* tidak memiliki pengaruh pada *financial sustainability*. Hal tersebut dilihat dari nilai probability signifikansi variabel *budget transparency* sebesar 0,937 > 0,05. Variabel *budget transparency* menunjukkan angka koefisien sebesar -0.008, artinya jika variabel *budget transparency* satu satuan, akan menurunkan nilai *financial sustainability* sebesar -0.008,. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini sehingga (H1) ditolak.

Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian Trisna et al.(2023) yang menemukan hasil variabel *budget transparency* tidak memiliki pengaruh pada *financial sustainability*. Transparansi tidak menjadi tolak ukur yang pasti dalam menilai kinerja keuangan dari laporan operasional pemerintah daerah yang menunjukkan evaluasi kapasitas pemerintah dalam mendanai kegiatan operasional , menyediakan layanan publik kepada masyarakat , mengalokasikan biaya , dan menjaga kualitas pelayanan. Meskipun pemerintah daerah melakukan transparansi anggaran, namun tidak sepenuhnya dapat meningkatkan nilai surplus/defisit operasional pemerintah daerah yang menggambarkan kemampuan pemberian layanan publik.

Agency theory berasumsi bahwa pengelola pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan sendiri sehingga tidak memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan menuntut untuk mengetahui lebih banyak informasi melalui transparansi anggaran untuk mengawasi dan memastikan bahwa alokasi dan pengelolaan sumber daya

telah digunakan semestinya dengan cara terbaik yang dapat mendorong pemberian layanan publik secara berkelanjutan. Akan tetapi, dengan dilakukannya transparansi anggaran oleh pemerintah daerah tidak secara langsung dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pemberian layanan publik secara berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah menunjukkan penggunaan sumber daya yang digunakan, jika sumber daya atau pendanaan milik pemerintah daerah terbatas atau tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pemberian layanan publik maka keberlanjutan keuangan pemerintah daerah tidak akan secara langsung tercapai.

Sesuai *agency theory*, pemerintah daerah selaku agen dapat menerima dana transfer dari pemerintah pusat untuk mencukupi pendanaan dalam rangka pemenuhan pemberian layanan publik kepada masyarakat. Dana yang diperoleh tersebut harus ditunjukkan penggunaannya kepada masyarakat dalam upaya transparansi. Namun, hal tersebut juga tidak dapat menjamin keberlanjutan keuangan jika kemampuan pemerintah daerah tidak efektif atau tidak maksimal dalam mengelola penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, *budget transparency* tidak sepenuhnya secara langsung dapat menjamin *financial sustainability* pemerintah daerah.

Pengaruh *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *fiscal autonomy* berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*. Hal tersebut dibuktikan dari nilai probability signifikansi variabel *fiscal autonomy* sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien dari variabel *fiscal autonomy* menunjukkan angka 0,998, artinya bahwa jika variabel *fiscal autonomy* naik satu satuan akan berdampak kenaikan variabel *financial sustainability* senilai 0,998. Dari penjelasan tersebut ditarik kesimpulan penelitian (H2) diterima dan sesuai dengan perumusan hipotesis

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brusca et al.(2015) (Wardhani & Payamta, 2020), dan Lhutfi & Sugiharti (2023) yang menunjukkan hasil positif antara *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability*. Pemerintah daerah yang mandiri memiliki pendapatan asli daerah yang berkontribusi besar terhadap pendapatan operasional. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat *fiscal autonomy* yang tinggi dapat mencari dana secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari pihak eksternal untuk membiayai pemerintahan dan pemenuhan kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan begitu, akan mengurangi beban pemerintah untuk melakukan pinjaman pada pihak eksternal untuk membiayai pemerintahan dan memberikan pelayanan publik sehingga akan menjamin keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan *agency theory*, pemerintah daerah selaku agen diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri oleh pemerintah pusat. Tujuan pemberian wewenang tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian layanan publik. Dengan adanya wewenang tersebut, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola daerahnya sendiri sehingga dapat memaksimalkan segala potensi pendapatan daerah yang ada. Dengan begitu, pemerintah daerah akan mencapai kondisi keuangan yang stabil karena pemerintah daerah dapat mendanai operasionalnya sendiri dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *fiscal autonomy* suatu daerah akan semakin menjamin keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dilihat dari hasil penelitian serta pembahasan, dapat ditarik kesimpulan *budget transparency* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah dan variabel *fiscal autonomy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2020-2022.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu: Terkait pengukuran *budget transparency*, penelitian ini menggunakan penilaian subjektif menggunakan indikator TPAD melalui analisis konten. Berbeda dengan penelitian rujukan, pengukuran *budget transparency* diambil dari data survey *Open budget index* yang diterbitkan oleh organisasi internasional yaitu *International Budget Partnership (IBP)* yang menghasilkan data yang lebih terukur. Penelitian ini memiliki keterbatasan terhadap penilaian kriteria ketepatan waktu. Keterbatasan ini disebabkan tidak seluruh kabupaten/kota mencantumkan kapan file TPAD diupload. Oleh karena itu, beberapa file dinyatakan tidak tepat waktu. Masih terbatasnya literatur dan referensi yang membahas terkait *financial sustainability* pemerintah daerah, khususnya dari faktor *budget transparency*. Hal ini disebabkan karena penelitian tentang *financial sustainability* pada sektor publik tersebut masih baru, termasuk di Indonesia.

Saran

Berikut saran yang diberikan berdasarkan hasil yang telah diperoleh: Bagi Pemerintah daerah diharapkan untuk menyajikan konten TPAD sesuai amanat Inpres RI No 7 Tahun 2015 pada website resmi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus memaksimalkan segala potensi pendapatan asli daerah untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan melakukan analisis keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dengan membuat kebijakan yang tepat untuk mendorong keberlanjutan keuangan daerah yang diperlukan untuk kesejahteraan generasi saat ini dan yang masa depan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan sampel pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia serta memperpanjang periode pengamatan. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti variabel independen dari faktor internal lainnya seperti faktor politik dan tata kelola atau faktor eksternal seperti faktor ekonomi, demografi, dan sosial yang memengaruhi *financial sustainability* atau menggabungkan kedua faktor tersebut untuk menganalisis pengaruhnya terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcaraz-Quiles, F. J., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D. (2014). Factors influencing the transparency of sustainability information in regional governments: An empirical study. *Journal of Cleaner Production*, 82, 179–191. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.06.086>
- Andrews, R. (2015). Vertical consolidation and financial sustainability: evidence from English local government. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 33(6), 1518–1545. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614179>
- Arbatli, E., & Escolano, J. (2015). Fiscal Transparency, Fiscal Performance and Credit Ratings. *Fiscal Studies*, 36(2), 237–270. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12051>

- Barbera, C., Jones, M., Korac, S., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2017). Governmental financial resilience under austerity in Austria, England and Italy: How do local governments cope with financial shocks? *Public Administration*, 95(3), 670–697. <https://doi.org/10.1111/padm.12350>
- Barrett, P. (2002). Achieving better practice corporate governance in the public sector. *Australian National Audit Office*, June. http://www.anao.gov.au/uploads/documents/Achieving_Better_Practice_Corporate_Governance_in_the_Public_Sector1.pdf
- Bastida, B., & Benito, F. (2009). Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah*, 403–417.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary solvency of Italian local governments: an assessment. *International Journal of Public Sector Management*, 32(2), 122–141. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2017-0328>
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). Drivers for the financial condition of local government: A comparative study between Italy and Spain. *Lex Localis*, 13(2), 161–184. [https://doi.org/10.4335/13.2.161-184\(2015\)](https://doi.org/10.4335/13.2.161-184(2015))
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2022). Budget transparency and financial sustainability. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 210–234. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0025>
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2023). The relevance of budget transparency for development. *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 239–256. <https://doi.org/10.1177/002085232111027525>
- Gadjah Mada, U. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition 1 Irwan Taufiq Ritonga. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164.
- Gardini, S., & Grossi, G. (2018). What is known and what should be known about factors affecting financial sustainability in the public sector: A literature review. *Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments*, March, 179–205. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3713-7.ch008>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 3 J. Fin. Econ. 305 (1976). *Economic Analysis of the Law*, H. MECKLING Copyright © 2003 by Blackwell Publishing Ltd, 162–176.
- Koromath, J. P. (2016). Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Ditinjau Dari Derajat Otonomi Fiskal Dan Indeks Kemampuan Rutin. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 65. <https://doi.org/10.21460/jrak.2016.121.182>
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2023). Financial Sustainability of Local Governments in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.48133>
- Maizunati, N. A., Daerah, P., Pusat, P., Daerah, P., & Magelang, K. (2020). Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 297–306.
- Navarro-Galera, A., Rodríguez-Bolívar, M. P., Alcaide-Muñoz, L., & López-Subires, M. D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. *Applied Economics*, 48(41), 3961–3975. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1148260>
- Nulailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya? *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 180–195. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5388>

- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>
- Pina, V., Bachiller, P., & Ripoll, L. (2020). Testing the reliability of financial sustainability. The case of Spanish local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17). <https://doi.org/10.3390/SU12176880>
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Rodríguez Bolívar, M. P. (2017). Financial sustainability in public administration: Exploring the concept of financial health. *Financial Sustainability in Public Administration: Exploring the Concept of Financial Health*, 1–268. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-57962-7>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2016). Risk Factors and Drivers of Financial Sustainability in Local Government: An Empirical Study. *Local Government Studies*, 42(1), 29–51. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>
- Santis, S. (2020). The demographic and economic determinants of financial sustainability: An analysis of Italian local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/su12187599>
- Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., Galera, A. N., & Bolívar, M. P. R. (2019). The influence of socio-demographic factors on financial sustainability of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 11(21). <https://doi.org/10.3390/su11216008>
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 1–109.
- Syamsul, S. (2020). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tpkd) Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185–204. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Trisna, T. B., Diswandi, & Nugraha, A. P. I. N. (2023). Determinants of Budget Transparency Toward Financial Sustainability. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 139(7), 98–113. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-07.11>
- Wällstedt, N., Grossi, G., & Almqvist, R. (2014). Organizational solutions for financial sustainability: A comparative case study from the Swedish municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 26(1), 181–218.
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>